

Strategi Kepala Sekolah Dalam Penerapan Pendidikan Inklusi di SD 010 Kongbeng

Norti Jalung¹, Hermanto²

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

e-mail: nortijalung.2025@student.uny.ac.id

Abstract: *The objectives of this study are (1) to determine the stages of the principal's strategy in implementing inclusive education, (2) to determine the principles of inclusive education implemented by the principal, and (3) to identify the challenges faced by the principal in implementing inclusive education at SD 010 Kongbeng. This study employed a descriptive qualitative research design and was conducted at SD 010 Kongbeng from February to May 2026. Data were collected through classroom observations, interviews with teachers, and documentation. The research instruments consisted of observation and interview guidelines. Data validity was ensured through source, technique, and time triangulation, as well as the use of reference materials. Data were analyzed through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that: (1) the strategy implemented by the principal of SD 010 Kongbeng in implementing inclusive education was systematic and gradual, encompassing early identification of students, socialization with stakeholders, implementation of differentiated instruction, and monthly evaluation. The principal demonstrated visionary yet realistic leadership adapted to the conditions of a school located in a plantation area and served as the primary driving force by providing strong moral and technical support to teachers. (2) The principal consistently applied the main principles of inclusive education, particularly equality, full participation, and individualization. The principal also promoted stakeholder collaboration and respect for diversity by incorporating the local cultural values of the Dayak community.*

Keywords: *Principal's Strategy, Inclusive Education, Elementary School*

Abstrak: *Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui tahapan strategi kepala sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, (2) mengetahui prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diterapkan oleh kepala sekolah, dan (3) mengetahui tantangan yang dihadapi kepala sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di SD 010 Kongbeng. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dilaksanakan di SD 010 Kongbeng pada Februari–Mei 2026. Teknik pengumpulan data meliputi observasi selama proses pembelajaran, wawancara dengan guru, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman observasi dan wawancara. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta penggunaan bahan referensi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) strategi yang diterapkan kepala sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif dilakukan secara sistematis dan bertahap, meliputi identifikasi awal peserta didik, sosialisasi kepada pemangku kepentingan, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, dan evaluasi bulanan. Kepemimpinan kepala sekolah yang visioner namun realistis serta disesuaikan dengan kondisi sekolah di kawasan perkebunan menjadikannya sebagai penggerak utama dalam implementasi pendidikan inklusif dengan memberikan dukungan moral dan teknis kepada guru.*

(2) Kepala sekolah secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip utama pendidikan inklusif, terutama kesetaraan, partisipasi penuh, dan individualisasi. Kepala sekolah juga membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menumbuhkan penghargaan terhadap keberagaman dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Dayak.

Kata kunci: Strategi Kepala Sekolah, Pendidikan Inklusif, Sekolah Dasar

Pendahuluan

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menjamin setiap peserta didik memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, serta kemajemukan bangsa. Komitmen terhadap pendidikan inklusif juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Kementerian Pendidikan Nasional, 2009) serta Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Landasan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar secara setara kepada seluruh peserta didik. Meskipun telah didukung oleh berbagai kebijakan, implementasi pendidikan inklusif di sekolah masih menghadapi sejumlah kendala. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum seluruhnya memiliki kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem pendukung pembelajaran yang memadai. Guru juga masih menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, merancang pembelajaran adaptif, dan melaksanakan asesmen sesuai karakteristik peserta didik. Wahab (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Keberhasilan tersebut juga bergantung pada kesiapan seluruh komponen sekolah dalam menyediakan lingkungan belajar yang ramah, inklusif, dan berkeadilan.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak terlepas dari kemampuan sekolah dalam menerapkan strategi pengelolaan yang tepat. Strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif. Dalam konteks pendidikan, strategi tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran di kelas, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program sekolah. Dengan demikian, implementasi pendidikan inklusif membutuhkan strategi yang mengintegrasikan aspek akademik, manajerial, dan pelayanan terhadap kebutuhan peserta didik. Kepala sekolah menjadi salah satu aktor utama dalam menentukan keberhasilan strategi tersebut. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah bertanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan, membangun budaya sekolah yang inklusif, meningkatkan kompetensi guru, mengoptimalkan sarana pendukung, serta mengembangkan kolaborasi dengan orang tua dan pemangku kepentingan. Kepala sekolah juga berperan dalam menggerakkan sumber daya sekolah agar layanan pendidikan dapat menyesuaikan keberagaman karakteristik peserta didik. Strategi secara umum dapat dipahami sebagai rangkaian keputusan yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan

efisien (Umar, 2020; Sumantri, 2021), sementara dalam konteks pembelajaran, strategi mencakup pendekatan dan metode yang dipilih guru untuk mencapai tujuan pembelajaran (Ramdani et al., 2023; Anjaya, 2023). Kepemimpinan kepala sekolah turut ditentukan oleh tipe dan gaya kepemimpinan yang diterapkan (Mattayang, 2019) serta keterampilan kepemimpinan yang dikembangkan secara berkelanjutan (Bakhtiar, 2022). Sebagai pemimpin pendidikan sekaligus tenaga profesional, kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi manajerial yang memadai (Rahmi, 2023). Badu dan Djafri (2023) menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan karena kepala sekolah berfungsi sebagai pengarah, penggerak, dan pengambil keputusan dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, strategi kepala sekolah menjadi faktor penting dalam membangun lingkungan belajar yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik.

Penelitian terdahulu mengenai pendidikan inklusif telah banyak membahas kompetensi guru, kesiapan sekolah, strategi pembelajaran, dan pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Sejumlah penelitian mengenai kepemimpinan pendidikan inklusif juga menunjukkan pentingnya kepala sekolah dalam membangun budaya inklusif, mengembangkan kolaborasi, dan mendukung profesionalisme guru. Namun, kajian tersebut pada umumnya menempatkan kepemimpinan kepala sekolah pada konteks sekolah dengan dukungan sumber daya yang relatif memadai atau membahas peran kepala sekolah secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis tahapan strategi kepala sekolah, penerapan prinsip-prinsip pendidikan inklusif, serta tantangan implementasinya dalam satu kerangka analisis pada sekolah dasar di wilayah perkebunan dengan keterbatasan sumber daya masih relatif terbatas. Kesenjangan tersebut penting dikaji karena karakteristik geografis, ketersediaan tenaga pendukung, kondisi sosial masyarakat, serta keterbatasan fasilitas dapat memengaruhi strategi kepemimpinan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kondisi tersebut juga ditemukan di SD 010 Kongbeng. Berdasarkan observasi awal, sekolah telah menerima dan memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam. Namun, implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan sumber daya pendukung, koordinasi layanan, kolaborasi antara sekolah dan orang tua, serta penguatan kapasitas guru dalam memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kondisi sekolah yang berada di wilayah perkebunan juga memberikan karakteristik tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kepala sekolah dituntut mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus membangun kerja sama dengan guru, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan agar prinsip-prinsip pendidikan inklusif tetap dapat dilaksanakan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis strategi kepala sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif pada konteks sekolah dasar di wilayah perkebunan dengan keterbatasan sumber daya. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi peran kepala sekolah secara umum, tetapi menganalisis secara terpadu tahapan strategi yang dilakukan kepala sekolah, penerapan prinsip-prinsip pendidikan inklusif, serta tantangan struktural dan kontekstual yang dihadapi dalam implementasinya. Konteks SD 010 Kongbeng memberikan perspektif empiris mengenai bagaimana kepemimpinan sekolah mengadaptasi prinsip pendidikan inklusif dengan kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, dan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian kepemimpinan pendidikan inklusif yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek guru, pembelajaran, dan kesiapan sekolah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kepala sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif di SD 010 Kongbeng dengan fokus pada tahapan strategi, penerapan prinsip-prinsip pendidikan inklusif, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian

diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan praktik kepemimpinan pendidikan inklusif, khususnya pada sekolah dasar yang memiliki keterbatasan sumber daya. Temuan penelitian juga diharapkan menjadi referensi bagi kepala sekolah dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan sekolah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (Sugiyono, 2019) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi kepala sekolah dalam penerapan pendidikan inklusi di SD Negeri 010 Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagaimana strategi serupa juga diterapkan pada jenjang pendidikan lain dalam pengembangan pendidikan inklusif (Nugroho, 2020). Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara komprehensif dalam konteks alamiah sehingga dapat menggambarkan secara utuh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi strategi kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian dilaksanakan pada bulan April–Mei Tahun Pelajaran 2025/2026. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Informan penelitian meliputi kepala sekolah sebagai informan utama serta guru kelas I sampai kelas V sebagai informan pendukung. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara semi terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen sekolah, seperti profil sekolah, program pendidikan inklusif, serta dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung implementasi strategi kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Wawancara semi terstruktur dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai kebijakan, pelaksanaan, tantangan, serta upaya yang dilakukan dalam mengembangkan pendidikan inklusif. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk menjelaskan strategi kepala sekolah dalam penerapan pendidikan inklusi beserta faktor pendukung dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 010 Kongbeng yang berlokasi di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sekolah ini berada di wilayah pedesaan yang didominasi oleh kawasan perkebunan kelapa sawit dan melayani peserta didik yang sebagian besar berasal dari keluarga petani dan pekerja perkebunan. SD Negeri 010 Kongbeng memiliki visi mewujudkan peserta didik yang beriman, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan, yang diwujudkan melalui peningkatan mutu pembelajaran, penguatan karakter, pengembangan potensi akademik dan nonakademik, serta terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, ramah anak, dan didukung oleh partisipasi aktif orang tua serta masyarakat.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah serta guru kelas I hingga kelas V yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis

melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran mengenai strategi kepala sekolah dalam penerapan pendidikan inklusi di SD Negeri 010 Kongbeng. Hasil observasi yang dilakukan selama Februari–Mei 2026 menunjukkan bahwa kepala sekolah menerapkan strategi secara bertahap melalui perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program inklusi. Pada tahap perencanaan dilakukan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus melalui observasi guru dan komunikasi dengan orang tua. Tahap pelaksanaan ditunjukkan dengan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas reguler, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, modifikasi tugas sesuai kebutuhan, serta penyediaan media pembelajaran sederhana yang mendukung layanan inklusif. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi kelas, rapat evaluasi berkala, serta koordinasi dengan guru dan orang tua untuk memantau perkembangan peserta didik. Secara umum, hasil observasi menunjukkan bahwa lingkungan sekolah telah menerapkan prinsip kesetaraan, partisipasi, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek sarana prasarana, aksesibilitas, serta dukungan sumber daya. Temuan ini juga menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih fleksibel sesuai karakteristik peserta didik, dengan kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama dalam mengarahkan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah.

Tahapan Strategi Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi

Hasil wawancara dengan guru kelas I hingga V menunjukkan bahwa kepala sekolah menerapkan strategi pendidikan inklusi secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, hingga evaluasi. Guru kelas I (HS) menyampaikan bahwa:

“Bu Kepala meminta kami observasi sejak minggu pertama. Anak yang lambat belajar, hiperaktif, atau sulit berkomunikasi langsung dicatat dan dikonfirmasi ke orang tua. Kami diminta memodifikasi tugas dan menggunakan media yang lebih variatif sesuai Kurikulum Merdeka, seperti gambar, lagu, dan permainan” (Wawancara, 13 April 2026).

Pada tahap penguatan pelaksanaan, kepala sekolah juga memfasilitasi peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan evaluasi rutin. Guru kelas IV (IS) menjelaskan,

“Kami pernah dikirim bimtek ke Sangatta satu kali dan Bu Kepala rutin membagikan materi melalui grup WA. Setiap bulan ada rapat evaluasi tim inklusi. Bu Kepala selalu mendengarkan kendala kami dan mencari solusi bersama” (Wawancara, 27 April 2026). Selain itu, guru kelas V (FU) menyampaikan bahwa “Bu Kepala mendorong pembentukan kelompok heterogen dan peer tutoring agar siswa reguler membantu teman ABK” (Wawancara, 27 April 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendamping dalam implementasi pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi kepala sekolah dilaksanakan secara bertahap melalui identifikasi awal peserta didik, sosialisasi kepada guru, implementasi pembelajaran berdiferensiasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Guru menilai bahwa Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi. Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan guru pendamping khusus (GPK), sarana dan prasarana yang belum memadai, serta terbatasnya kesempatan mengikuti pelatihan. Secara keseluruhan, strategi kepala sekolah dinilai telah berjalan dengan baik dan menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri 010 Kongbeng.

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah berupaya menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi melalui kesetaraan, partisipasi penuh, individualisasi pembelajaran, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Guru kelas I (HS) menyampaikan bahwa:

“Bu Kepala selalu tekankan bahwa semua anak sama, tidak boleh ada yang dikucilkan. Anak ABK tetap ikut upacara, istirahat, dan kegiatan bersama. Kami diminta memperhatikan gaya belajar masing-masing anak, ada yang visual, ada yang kinestetik” (Wawancara, 13 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepala sekolah menanamkan budaya sekolah yang menghargai keberagaman sekaligus mendorong guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik setiap peserta didik. Penerapan prinsip inklusi juga terlihat dari upaya kepala sekolah dalam mengembangkan pembelajaran yang adaptif serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Guru kelas IV (IS) mengungkapkan bahwa:

“Bu Kepala meminta kami membuat modifikasi tugas dan penilaian untuk setiap anak ABK sesuai kemampuannya. Beliau berusaha menyesuaikan lingkungan sekolah meski sarannya terbatas, seperti penataan meja dan pojok sensory sederhana” (Wawancara, 27 April 2026).

Selain itu, hasil wawancara dengan guru lainnya menunjukkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama siswa reguler tanpa diskriminasi, memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai kegiatan sekolah, serta didukung melalui koordinasi dengan orang tua dan Dinas Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah telah mengimplementasikan prinsip-prinsip utama pendidikan inklusi, terutama kesetaraan, partisipasi penuh, individualisasi pembelajaran, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Guru menilai kepemimpinan kepala sekolah mampu membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman, termasuk memanfaatkan nilai gotong royong masyarakat Dayak sebagai penguat praktik inklusi. Meskipun demikian, implementasi prinsip aksesibilitas masih menghadapi kendala akibat keterbatasan sarana prasarana dan dukungan sumber daya, sehingga diperlukan penguatan fasilitas, pelatihan guru, serta dukungan dari pemerintah agar penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat berjalan lebih optimal.

Tantangan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi di SD Negeri 010 Kongbeng. Tantangan utama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, khususnya belum tersedianya guru pendamping khusus (GPK), sehingga guru kelas harus menangani peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik yang beragam. Guru kelas I (HS) menyampaikan bahwa:

“Tantangan terbesar Bu Kepala adalah tidak ada guru pendamping khusus. Semua beban jatuh ke guru kelas reguler yang sudah mengajar banyak anak dan Kepala sekolah harus ekstra sabar mendatangi rumah orang tua untuk sosialisasi” (Wawancara, 13 April 2026).

Selain itu, lokasi sekolah yang berada di wilayah pedesaan juga menyulitkan akses terhadap tenaga ahli, seperti psikolog dan terapis, serta memperlambat proses memperoleh dukungan dari pemerintah. Tantangan lain yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan sarana prasarana, anggaran, dan pelatihan bagi guru. Guru kelas IV (IS) mengungkapkan bahwa:

“Sekolah belum memiliki fasilitas ramah disabilitas yang memadai. Toilet khusus, alat bantu belajar, dan ruang sensory masih sangat sederhana dan pelatihan inklusi masih jarang, padahal kami butuh pembinaan berkelanjutan” (Wawancara, 27 April 2026).

Hasil wawancara dengan guru lainnya juga menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menghambat penyediaan media pembelajaran yang sesuai, sementara masih adanya stigma masyarakat dan rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap kondisi anak menjadi kendala dalam membangun kolaborasi yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi kepala sekolah bersifat kompleks, meliputi aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, akses terhadap layanan profesional, serta dukungan dari orang tua dan masyarakat. Meskipun demikian, guru menilai kepala sekolah memiliki komitmen yang tinggi dalam mengatasi berbagai kendala melalui komunikasi dengan orang tua, pengajuan bantuan kepada Dinas Pendidikan, dan berbagai upaya kreatif yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Namun, berbagai keterbatasan tersebut menyebabkan implementasi pendidikan inklusi di SD Negeri 010 Kongbeng masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya optimal.

Uji Keabsahan Data dan Analisis Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah dan guru kelas I sampai kelas V mengenai strategi kepala sekolah dalam penerapan pendidikan inklusi. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda selama periode penelitian sehingga konsistensi informasi yang diperoleh dapat terjamin. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi sehingga dapat dipercaya sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan sesuai fokus penelitian, yaitu tahapan strategi kepala sekolah, prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan proses interpretasi terhadap temuan penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi kepala sekolah dalam penerapan pendidikan inklusi di SD Negeri 010 Kongbeng dilaksanakan secara sistematis melalui identifikasi peserta didik, sosialisasi, implementasi pembelajaran berdiferensiasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Kepala sekolah juga telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusi, seperti kesetaraan, partisipasi, individualisasi, dan kolaborasi, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan guru pendamping khusus, sarana prasarana, anggaran, serta dukungan dari orang tua dan masyarakat. Seluruh temuan tersebut diverifikasi secara berulang hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepala sekolah dalam penerapan pendidikan inklusi di SD Negeri 010 Kongbeng dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan identifikasi awal peserta didik, sosialisasi kepada guru dan orang tua, implementasi pembelajaran berdiferensiasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Strategi tersebut menunjukkan bahwa kepala sekolah berperan sebagai pemimpin yang mampu mengarahkan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif sesuai dengan kondisi sekolah di wilayah perkebunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amalia (2023) yang menyatakan

bahwa keberhasilan pendidikan inklusi dipengaruhi oleh pelaksanaan strategi kepala sekolah yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, Norsandi et al. (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan sekolah inklusi diawali dengan penyusunan kebijakan dan budaya sekolah yang mengakomodasi keberagaman peserta didik. Fleksibilitas Kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah juga mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, sejalan dengan pandangan bahwa kurikulum yang fleksibel memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus (Ningrum, 2022).

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa kepala sekolah berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan, supervisi, serta pendampingan selama proses pembelajaran. Dukungan tersebut mendorong guru untuk memodifikasi metode, media, dan penilaian sesuai kebutuhan peserta didik. Kondisi ini sejalan dengan konsep kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Billingsley dan McLeskey (2014) serta diperkuat oleh Minsih dkk. (2019), yang menyatakan bahwa kepala sekolah berperan penting dalam meningkatkan kompetensi guru melalui pemberdayaan, motivasi, dan kolaborasi. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan guru pendamping khusus (GPK), sarana prasarana, dan kesempatan mengikuti pelatihan masih menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusi. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Bahri (2022) yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas merupakan hambatan dominan pada penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar.

Selain strategi pelaksanaan, penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusi secara konsisten melalui penerapan kesetaraan, partisipasi penuh, individualisasi pembelajaran, serta kolaborasi dengan orang tua dan berbagai pemangku kepentingan. Peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar bersama peserta didik reguler tanpa perlakuan diskriminatif, sedangkan guru diberikan keleluasaan untuk melakukan modifikasi pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing peserta didik. Temuan tersebut mendukung penelitian Hamidaturrohman dkk. (2023) yang menyatakan bahwa prinsip kesetaraan dan partisipasi merupakan fondasi utama penyelenggaraan pendidikan inklusi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Joko Yuwono dkk. (2021) yang menegaskan bahwa individualisasi pembelajaran melalui modifikasi materi dan penyesuaian penilaian menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Keberhasilan implementasi prinsip pendidikan inklusi juga dipengaruhi oleh kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kepala sekolah memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Dayak, seperti gotong royong dan kebersamaan, untuk memperkuat penerimaan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, sejalan dengan kajian sosiologi pendidikan mengenai pentingnya nilai budaya masyarakat dalam mendukung praktik pendidikan yang inklusif (Rifa'i, 2024). Selain itu, keterlibatan guru, orang tua, dan komite sekolah mendukung temuan Ainscow dan Sandill (2010) serta Das dan Halik (2021) yang menegaskan bahwa kolaborasi berbagai pihak merupakan faktor penting bagi keberlanjutan program pendidikan inklusi. Namun demikian, keterbatasan fasilitas ramah disabilitas masih menjadi tantangan sehingga implementasi prinsip aksesibilitas belum dapat terlaksana secara optimal, sebagaimana juga ditemukan oleh Ismuha dkk. (2020) dan Nadrah (2023).

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tantangan utama kepala sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sosial. Keterbatasan guru pendamping khusus, minimnya sarana prasarana, keterbatasan anggaran, serta sulitnya akses terhadap tenaga ahli menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan layanan pendidikan inklusi. Selain itu, masih terdapat stigma masyarakat dan rendahnya

kesadaran sebagian orang tua terhadap kondisi anak berkebutuhan khusus sehingga kolaborasi belum berjalan secara optimal. Temuan ini mendukung hasil penelitian Bahri (2022) serta Ismuha dkk. (2020) yang menyatakan bahwa sekolah-sekolah di wilayah pedesaan umumnya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial dalam implementasi pendidikan inklusi. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan tersebut, kepala sekolah tetap menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan pendidikan inklusi melalui berbagai strategi adaptif sesuai kondisi sekolah. Kepala sekolah terus membangun komunikasi dengan guru, orang tua, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi. Temuan ini memperkuat penelitian Muqowin (2021) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang proaktif dan adaptif mampu menjaga keberlangsungan implementasi pendidikan inklusi, meskipun berada pada lingkungan dengan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri 010 Kongbeng tidak hanya ditentukan oleh komitmen kepala sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, penyediaan guru pendamping khusus, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan sarana dan prasarana agar implementasi pendidikan inklusi dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan, sejalan dengan strategi kepemimpinan kepala sekolah pada implementasi pendidikan inklusif di jenjang pendidikan lain (Putri et al., 2020).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi kepala sekolah dalam penerapan pendidikan inklusi di SD Negeri 010 Kongbeng telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan identifikasi peserta didik, sosialisasi, implementasi pembelajaran berdiferensiasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Kepala sekolah juga telah menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusi, seperti kesetaraan, partisipasi, individualisasi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif sesuai dengan kondisi sekolah di wilayah perkebunan. Meskipun demikian, implementasi pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan guru pendamping khusus, sarana dan prasarana, anggaran, serta rendahnya kesadaran sebagian orang tua dan masyarakat.

Temuan ini memiliki implikasi bahwa keberhasilan penerapan pendidikan inklusi tidak hanya bergantung pada komitmen dan kepemimpinan kepala sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu cakupan yang hanya berfokus pada satu sekolah dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuannya belum dapat digeneralisasikan pada konteks sekolah dasar lain dengan karakteristik berbeda. Berdasarkan temuan tersebut, sekolah diharapkan terus memperkuat program pendidikan inklusi melalui peningkatan kompetensi guru, pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, serta evaluasi program secara berkelanjutan; pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan perlu memberikan dukungan yang lebih optimal melalui penyediaan guru pendamping khusus, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, serta pelatihan bagi tenaga pendidik; dan orang tua serta masyarakat perlu meningkatkan keterlibatan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi agar tercipta lingkungan belajar yang menerima keberagaman. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi pendidikan inklusi pada berbagai karakteristik sekolah dengan melibatkan lebih banyak informan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan pendidikan inklusif.

Referensi

- Ainscow, M., & Sandill, A. (2010). Developing inclusive education systems: The role of organisational cultures and leadership. *International Journal of Inclusive Education*, 14(4), 401–416. <https://doi.org/10.1080/13603110802504903>
- Amalia, Z. (2023). *Strategi kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri 7 Trienggadeng* (Skripsi tidak diterbitkan). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Anjaya, W. (2023). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Kencana.
- Badu, S. Q., & Djafri, N. (2023). *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*. Ideas Publishing.
- Bahri, S. (2022). Manajemen pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1).
- Bakhtiar. (2022). Pengembangan keterampilan kepemimpinan. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(7).
- Billingsley, B. S., & McLeskey, J. (2014). What are the roles of principals in inclusive schools? In J. McLeskey, N. L. Waldron, F. Spooner, & B. Algozzine (Eds.), *Handbook of effective inclusive schools: Research and practice* (pp. 67–79). Routledge.
- Das, W. H., & Halik, A. (2021). *Kompetensi manajerial kepala madrasah dan relasinya terhadap profesionalisme guru*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hamidaturrohmah, dkk. (2023). *Pendidikan inklusi di sekolah dasar*. Cahya Ghani Recovery.
- Ismuha, dkk. (2020). Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pada SD Negeri Lamklut Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 4(1).
- Joko Yuwono, dkk. (2021). *Buku saku penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar*. Direktorat Sekolah Dasar.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa*. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Mattayang, B. (2019). Tipe dan gaya kepemimpinan: Suatu tinjauan teoritis. *JEMMA: Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2).
- Minsih, dkk. (2019). Kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun sekolah berkualitas di sekolah dasar. *Jurnal Profesi Pendidikan Dasar*, 6(1).
- Muqowin. (2021). Peran kepala sekolah terhadap kebijakan pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran*, 7(3). <https://doi.org/10.33394/jk.v7i3.3468>
- Nadrah. (2023). Model evaluasi pendidikan inklusif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2).
- Ningrum, N. A. (2022). Strategi pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(3), 181–196.
- Norsandi, D., Wisman, Y., Alamsyah, I. N., & Bernisa, B. (2025). Urgensi pendidikan inklusif: Membangun lingkungan pembelajaran yang mendukung kesetaraan dan kearifan budaya. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 16(1), 114–126. <https://doi.org/10.37304/jikt.v16i1.392>
- Nugroho, K. (2020). *Strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan inklusif di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Kota Malang* (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Putri, Z. F., dkk. (2020). Strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Yogyakarta. *Khazanah Intelektual*, 4(3).

- Rahmi, S. (2023). *Kepala sekolah dan guru profesional*. Percetakan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Ramdani, N. G., Fauziyyah, N., Fuadah, R., Rudiyo, S., Septiyaningrum, Y. A., Salamatussa'adah, N., & Hayani, A. (2023). Definisi dan teori pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation*, 2 (1), 20–28.
- Rifa'i, M. (2024). *Sosiologi pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Saroni, M. (2023). *Manajemen sekolah: Kiat menjadi pendidik yang kompeten*. Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development)*. Alfabeta.
- Sumantri, M. S. (2021). *Strategi pembelajaran: Teori dan praktik di tingkat pendidikan dasar*. PT RajaGrafindo Persada.
- Umar, H. (2020). *Manajemen strategik: Konsep dan analisis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, R. (2023). *Pembelajaran inklusif dan tantangan guru*. Universitas Negeri Makassar.